

## **Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer**

Dany Rukma<sup>1\*</sup> & Saiman Pakpahan<sup>2\*</sup>

### **Abstract**

*This study discusses the Australian intervention against the coup in Fiji, in this discussion mentioned that the Australian state with the fear of a military coup that occurred in Fiji negative impact on Australia. Where the export of Australia have a high value in Fiji. Australia wants to make the region south pacific is a country that is harmonious, and prosperous. Australia is a country that is becoming a major supplier of goods to the countries that are south pacific region, and it is this that led to the Australian intervention against Fiji in 2006 to date.*

**Key Words:** *Australia, south pacific, intervention, military coup,*

### **Pendahuluan**

Tantangan utama di kawasan pasifik selatan bukanlah bentuk ancaman tradisional seperti invansi suatu Negara ke Negara lain ataupun masalah batas territorial. Masalah yang banyak muncul sebagai tantangan terhadap masalah perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan pasifik selatan seperti isu-isu ancaman berupa konflik internal, kejahatan lintas Negara, perdagangan manusia dan penangkapan ikan secara illegal.<sup>3</sup>

Sebagian besar Negara di pasifik selatan seperti papua new guinea (PNG), Fiji, Samoa menentang gagasan Negara modern akibat kurangnya identitas nasional negara-negara tersebut. Khusus Negara Fiji penentangan konsep Negara modern yang berhaluan demokrasi menjadi sebuah pertentangan oleh masyarakat ataupun pemimpin ortodoks Negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh disparitas social dan ekonomi antara penduduk pendatang dari india dan penduduk asli yang menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi pada Negara ini<sup>4</sup>.

Seringnya terjadi konflik setelah kemerdekaan Fiji membuat lemahnya politik dan nilai-nilai demokrasi di negara ini. Banyak kontroversi politik Fiji yang berhubungan dengan masalah etnis yang merupakan karakteristik politik Fiji. Fiji adalah sebuah negara unik di

1 \* Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

2 \* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

3 Ikrar, Nusa Bakti, *Keamanan Pasifik Selatan*, makalah singkat yang dibawakan pada seminar “keamanan regional Indonesia: tantangan, peluang dan respon” yang diselenggarakan oleh badan pengkajian dan pengembangan kebijakan, departemen luar negeri republic Indonesia, Jakarta 17 Desember 2002.

4 Ibid hal 5

dunia yang menjadikan populasi besar yang berbasis ras, salah satunya adalah masalah kepemilikan atas tanah.

Disisi lain adanya intervensi terhadap politik oleh militer yang disebabkan ketiadaan institusi politik Fiji yang efektif. Partai politik merupakan salah satu institusi politik dalam banyak masyarakat majemuk etnik cenderung berdasarkan pada kelompok etnik tertentu dan tujuannya adalah untuk bersama-sama memerintah negara dengan suatu cara yang memberikan semua kesempatan untuk ambil bagian.

Partai politik Fiji meskipun secara resmi merupakan partai politik multi ras dan di klaim sebagai perwakilan dari semua penduduk Fiji agar tercipta pemerintahan yang multi etnik, namun pada kenyataannya partai politik yang dibentuk berdasarkan pada kelompok etnis tertentu sehingga anggota yang duduk dalam pemerintahan biasanya didominasi oleh etnis yang sama. Kadang tak satu pun dari partai politik bisa memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan, karena itu partai politik Fiji harus berkoalisi dengan partai lain untuk memperkuat posisi mereka.

Negara Fiji telah mengalami beberapa kali kudeta dalam menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Kudeta pertama terjadi pada tanggal 14 Mei 1987 Kudeta pertama ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, ia memimpin pasukan militernya masuk ke dalam gedung parlemen dan menggulingkan pemerintahan Timoci Bavadra. Kudeta ini disebabkan oleh keprihatinan yang menyatakan bahwa pemerintah di dominasi oleh komunitas Indo-Fiji<sup>5</sup>.

Rabuka yang tergabung dalam Fijian Political Party (*Soqosoqo Vakavuleva ni Taukei*), kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Gubernur Jendral Ratu Sir Penaia Ganilau, yang diharapkan bisa melaksanakan kepentingan etnis Fiji. Ganilau mencoba untuk mengembalikan lagi konstitusi yang dibatalkan.

Rabuka kembali melancarkan kudeta kedua pada 25 September 1987 Rabuka kemudian membentuk pemerintahan sementara pada 5 Desember, dan mengangkat Kamisese Mara sebagai Perdana Menteri dan Ganilau sebagai Presiden. Rabuka kemudian mendeklarasikan Fiji sebagai Negara Republik.<sup>6</sup>

Pemerintahan kemudian menyusun konstitusi baru yang disahkan pada bulan Juli 1990. Dalam konstitusi tersebut, menyebutkan bahwa kursi legislative diberikan lebih banyak kepada etnis Fiji (penduduk

5 Etnis indo-fiji merupakan pendatang dari india yang dibawa oleh pemerintahan inggris tahun 1878 untuk mengelola perkebunan tebu di Fiji. Pupolasi keturunan india di Fiji mencapai 48,2 % dari total penduduk Fiji.

6 Nohlen, Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 1994, hal 186  
1838

pribumi). Berdasarkan data statistik tahun 1989, sejak tahun 1946 populasi penduduk Fiji dihuni oleh mayoritas etnis Fiji. Konstitusi 1990 ini menjamin etnis Fiji kekuasaan atas Fiji. Dengan diberlakukannya konstitusi tersebut, lebih dari 12.000 etnis Indo-Fiji dan etnis minoritas lainnya meninggalkan Fiji. Terjadinya emigrasi besar-besaran ini menyebabkan kesulitan ekonomi.<sup>7</sup>

Kudeta selanjutnya terjadi bulan Mei tahun 2000 yang dipimpin oleh George Speight atau Ilikimi Naitini, seorang nasionalis Fiji garis keras merupakan seorang pengusaha keturunan etnis Fiji dan campuran Eropa, bergabung dengan para pendukungnya orang-orang bersenjata ilegal yang menentang dominasi masyarakat India di Kepulauan Fiji.<sup>8</sup>

Perdana Menteri Mahendra Chaudry dan anggota parlemennya disandera kelompok bersenjata. Speight mengklaim bahwa etnis Indo-Fiji merongrong hak-hak pribumi Fiji yang kemudian mendeklarasikan konstitusi baru yang mengarahkan pada pembatalan dan pengosongan hak-hak politik etnis Indo Fiji. Speight kemudian memecat Perdana Menteri Fiji, Mahendra Chaudry dan Presiden Kamisese Mara, dan Speight mengambil sumpah sebagai Perdana Menteri dan memproklamirkan Ratu Jope Seniloli sebagai Presiden

Frank Bainimarama yang saat itu sebagai pemimpin militer turun tangan untuk menetralkan keadaan, dan mengeluarkan kebijakan untuk menangkap para pelaku kudeta ini, Speight kemudian ditahan di penjara di pulau Nukulau di lepas pantai Suva Speight ditahan atas tuduhan pengkhianatan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap parlemen dan penyanderaan Perdana Menteri Mahendra Chaudry.

Demokrasi kemudian dipulihkan kembali menjelang akhir tahun 2000, dan militer melantik mantan Bankir, Laisenia Qarase sebagai Perdana Menteri sementara Qarase berasal dari etnis Fiji yang dipilih untuk mengatasi masalah krisis politik dan memperbaiki hubungan dengan luar negeri. Walaupun Qarase ditunjuk oleh militer menjadi Perdana Menteri, Qarase akan membentuk pemerintahan demokratis yang lepas dari pengaruh militer.

Pada Agustus 2005, Qarase memperkenalkan undang-undang tentang rekonsiliasi atau perdamaian, toleransi dan persatuan, yang diarahkan pada para pendukung kudeta, termasuk George Speight, pelaku kudeta 2000. Namun Qarase dihadapkan pada kritik dan ancaman

---

7 Ibid Brown Peter, *Australian Influence in the South Pacific*, Australian Defence College, 2012.

8 Diakses dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/05/22/2002.html/> pada tanggal 4 juli 2013

dari pihak militer. Frank Bainimarama telah berulang kali masuk dalam gelanggang politik untuk mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya pada pengampunan para pelaku kudeta dan kebijakan kontroversi lainnya. Dan hal ini telah merenggangkan hubungan dengan rezim yang berkuasa, dan membuat beberapa politisi lain menuduhnya ikut campur dalam urusan politik.

Setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Fiji, Frank Bainimarama, mengambil-alih kekuasaan pemerintah. Beberapa minggu sebelumnya Bainimarama menuduh pemerintah melakukan korupsi dan mengancam akan melakukan kudeta yang berakhir dengan pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 5 Desember 2006.<sup>9</sup>

Bainimarama tampil sebagai penguasa tunggal Fiji yang kemudian membentuk kabinet sementara yang beranggotakan 13 orang, mengangkat Ratu Josefa Iloilo sebagai Presiden dan menunjuk Jona Senilagakali sebagai Perdana Menteri pada 5 Desember 2006. Jona Senilagakali menjabat sebagai Perdana Menteri dari tanggal 5 Desember 2006 - 4 Januari 2007, karena Presiden Fiji kemudian secara formal mengangkat Bainimarama sebagai Perdana Menteri pada 5 Januari 2007.

Sementara itu, Australia dan Selandia Baru mengecam pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer didepan parlemen di Canberra menyatakan, aksi militer tersebut dapat berdampak buruk pada perekonomian Fiji. Dalam pidatonya Alexander Downer mengatakan:

*“Komandan militer Fiji Bainimarama bersikeras untuk menghancurkan demokrasi serta melemahkan konstitusi. Jika komandan ingin mengetahui pendapat dunia atas aksi yang dilakukan militer, seharusnya ia menghormati konstitusi dan membiarkan institusi yang bersangkutan melakukan pekerjaannya”.*<sup>10</sup>

Australia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengupayakan pemulihan demokrasi di Fiji. Langkah ini diambil oleh pemerintah negara Australia sebagai respon atas tindakan kudeta militer yang dilakukan di bawah komando Frank Bainimarama yang menggulingkan pemerintahan sipil di tahun 2006. Pemerintah Australia melakukan hal tersebut untuk menghindari terjadinya efek domino di negara-negara Pasifik Selatan lainnya.

Australia tidak menginginkan adanya kudeta militer serupa yang

9 “Kudeta militer Fiji” diakses dari <http://dw.de/p/CPAc> pada tanggal 4 juli 2013

10 Ibid

menyalahi demokrasi di dalam kawasan tersebut karena hal ini dapat mengancam keamanan negara Australia. Pada awal terjadinya kudeta, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase meminta intervensi pasukan Australia. Permintaan intervensi pasukan ini ditujukan untuk membantu pemerintah Fiji dalam menghadapi kudeta militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama. Namun permintaan tersebut ditolak oleh PM John Howard karena tidak ingin ikut campur dalam krisis politik di Fiji. Meskipun demikian, John Howard tetap bersikap mengecam tindakan kudeta militer di Fiji yang melanggar aturan demokrasi konstitusional.

Australia merupakan salah satu Negara besar dikawasan pasifik selatan dan berperan penting dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk memajukan kawasan pasifik selatan merasa perlu untuk memainkan peran strategisnya. Australia tidak menginginkan adanya kudeta militer serupa yang menyalahi demokrasi di dalam kawasan tersebut karena hal ini dapat mengancam keamanan negara Australia. Terjadinya kudeta Fiji tahun 2006 ditakutkan akan menjalar dan memberikan efek domino pada Negara-negara dikawasan Pasifik Selatan lainnya yang sangat rawan dalam masalah instabilitas politik dan keamanan dari dalam Negara masing-masing.

Disisi lain Australia juga menjalin kerjasama perdagangan dengan negara Fiji. Total perdagangan Australia dengan Negara Fiji cukup besar dibandingkan dengan Negara-negara yang ada Pasifik lainnya. Fiji menjadi Negara tujuan ekspor Australia dengan bahan komoditas. Ekport utama Australia ke Fiji adalah Gandum, *Liquefied propana butana*, Minuman beralkohol, kain buatan manusia, tenunan. Sementara import utama Australia dari Fiji adalah sayuran, emas, pakaian, sereal.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kepentingan Australia Dengan Fiji**

Australia menjadi negara maju di kawasan Pasifik Selatan ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada bekas koloni yang tersisa dan mundur dari kawasan ini pada tahun 1970. Australia mengejar kepentingannya di Pasifik Selatan dengan memperkuat hubungan regional dan bilateral, dengan keseimbangan antara kedua hubungan ini mempengaruhi negara-negara kepulauan dan isu-isu yang ada dikawasan ini. Australia terlibat dengan negara-negara kecil seperti Melanesia, PNG, Fiji dan Kepulauan Solomon.

Australia dan Selandia Baru mendorong terbentuknya forum

regional pemimpin-pemimpin Pasifik selatan untuk membahas isu-isu regional dan kerjasama di Pasifik Selatan, dengan nama *South Pacific Forum*. Pertemuan Pertama Forum Pasifik Selatan dihadiri oleh tujuh anggota pendiri, Australia, Cook Islands, Fiji, Nauru, Selandia Baru, Tonga dan Samoa Barat, diadakan pada tahun 1971 di Selandia Baru. Seiring waktu, Forum Pasifik Selatan berkembang dan diperluas untuk mencakup lebih banyak negara dan berganti nama menjadi Forum Kepulauan Pasifik ( PIF ) pada tahun 2000. Tata kelola ekonomi yang baik dan masalah keamanan menjadi bagian penting dari agenda Forum ini. Australia sebagai negara maju dan juga sebagai anggota pendiri menempatkan posisinya dalam posisi yang kuat untuk mengerahkan pengaruh di tingkat regional.

Australia menjaga kepentingan strategis di Pasifik Selatan, dan telah berusaha mempengaruhi negara-negara kepulauan Pasifik sesuai, dengan penekanan yang jelas bergeser dari isu-isu yang terjadi. Selama Perang Dingin, fokus kebijakan Australia di wilayah ini adalah penolakan strategis terhadap kekuatan asing berpotensi menjadikan wilayah ini arena konflik yang akan mengakibatkan wilayah Australia rentan terhadap serangan.

Australia dan Selandia Baru memimpin kampanye, termasuk dengan negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan terhadap uji coba nuklir Perancis di Pasifik. Australia mampu mempengaruhi negara-negara kepulauan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih 'moderat'. Satu contoh menjadi keberhasilan dalam melegitimasi kepentingan di Pasifik Selatan adalah *South Pacific Nuclear Free Zone* di bawah *Perjanjian Rarotonga* pada tahun 1985.

**Tabel 1. Kerjasama Australian Dengan Fiji dan Negara di Pasifik Selatan Lainnya Dalam Kerangka Keamanan, Politik dan isu-isu lainnya.**

Association	Status	Law enforcement / security role	Headquarters
Forum Fisheries Agency (FFA)	Intergovernmental organisation	Maintains the register of vessels in good standing, as well as the vessel monitoring scheme to enforce compliance with access agreements.	Honiara, Solomon Islands
Forum Regional Security Committee (FRSC)	Program of an intergovernmental organisation (the PIF)	Promotes interagency law enforcement cooperation and information exchange on law and security issues.	Suva, Fiji
Oceania Customs Organisation	Voluntary association	Promotes cooperation, harmonisation and mutual assistance in customs administration among participating organisations.	Suva, Fiji
Pacific Immigration Directors Conference	Voluntary association	Fosters multilateral cooperation and mutual assistance to strengthen members' territorial borders and the integrity of their immigration systems.	Suva, Fiji
Pacific Islands Law Officers' Network	Incorporated association	Facilitates cooperation between member countries on regional approaches to law and justice issues and on the development of regionally supported law and justice policies for consideration by members.	Apia, Samoa
Pacific Islands Chiefs of Police	Voluntary association	A cooperative arrangement to improve policing and communication and provide a forum to share information and intelligence to counter transnational crime in the region.	Wellington, New Zealand
South Pacific Regional Environment Programme (SPREP)	Intergovernmental organisation	Advises members on compliance with environmental obligations. Also advises the FRSC on transboundary violations.	Apia, Samoa
Economic Development Division	Division of an intergovernmental organisation (the SPC)	Maintains databases for validating port security, International Maritime Organization compliance and vessel movements.	Suva, Fiji
Pacific Transnational Crime Coordination Centre	Project of Australian Federal Police	Clearing house for the Pacific Transnational Crime Network and data from national transnational crime units. Also provides advice and training to the crime units.	Apia, Samoa

Negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan di golongan Negara miskin di dunia. semua negara Pasifik selatan telah menantang untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan menggunakan hasil penjualannya untuk lebih mengembangkan perekonomian bangsa mereka. Australia secara konsisten mendorong negara-negara di Pasifik

Selatan untuk mengatur dan meliberalisasi pengaturan perdagangan di antara mereka, dengan Australia, dan dengan seluruh dunia.

Transisi dari pendekatan berbasis tarif ke ekonomi perdagangan bebas tidak mudah, dan beberapa pendapat mengatakan pendekatan neoliberal dengan perdagangan bebas mungkin tidak tepat, setidaknya belum tepat untuk negara berkembang di kepulauan Pasifik.

Pendapatan per kapita yang rendah, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini sekitar US \$ 1,200 US, Fiji \$ 3.600 dibandingkan dengan Australia sebesar US \$ 46.000 atau Selandia Baru sebesar US \$ 29.000. Salah satu sumber penting, untuk pemasukan Negara fiji berupa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. sekitar lima belas persen penduduk Fiji tinggal dan bekerja di luar negeri. Negara-negara Melanesia umumnya memiliki tingkat lebih rendah dalam devisa dari luar negeri, tetapi bisa meningkat jika ada kesempatan yang lebih besar untuk migrasi tenaga kerja, terutama ke Australia.<sup>11</sup>

Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat di Fiji, Papua Nugini dan Samoa. Enam tahun lalu diprediksi bahwa kemiskinan perkotaan akan menjadi masalah yang paling penting di Pasifik selama dekade mendatang.

Negara-negara di Pasifik Selatan telah menerima banyak bantuan internasional, dibandingkan daerah lain di dunia. bantuan pembangunan yang telah diberikan, jelas belum mampu meningkatkan dan menghilangkan masalah mendasar bagi negara tersebut. Australia menyumbang lebih dari setengah dari semua bantuan pembangunan luar negeri ke negara-negara kepulauan Pasifik.

### **Intervensi Australia Terhadap Fiji Setelah Terjadi Kudeta Tahun 2006**

Pada bulan April 2009, krisis politik dan konstitusi muncul di Fiji. diikuti oleh putusan Banding hakim dari Pengadilan Fiji yang menyatakan bahwa, menurut Konstitusi Fiji Pemerintah interim yang berkuasa dibawah Commodore Bainimarama tidak sah. Presiden Iloilo kemudian mengumumkan serangkaian langkah-langkah secara efektif menyebabkan pengetatan cengkeraman rezim militer atas banyak aspek kehidupan politik dan sosial - ekonomi Fiji.

Presiden Iloilo membatalkan konstitusi Fiji, memberhentikan hakim Pengadilan Tinggi, menghapuskan semua posisi konstitusional

<sup>11</sup> Jones, Jenny Hayward Policy Brief, *Policy Overboard: Australia's Increasingly Costly Fiji Drift*, Lowy Institute For International Policy: May 2011.



di negeri itu, dan membatasi kebebasan media di Fiji. Presiden Iloilo juga mengangkat kembali Commodore Bainimarama sebagai Perdana Menteri interim selama lima tahun, sehingga menunda pemilu sampai 2014.

Krisis terbaru di Fiji menunjukkan rapuhnya masalah politik di negara Fiji. Rezim Commodore Bainimarama memandang Konstitusi Fiji tahun 1997 bermasalah, dan menginginkan untuk mereformasi. Presiden Iloilo telah menggunakan argumen yang sama sebagai dalih untuk memperpanjang kekuasaan militer dalam upaya mereka mereformasi politik Fiji. Menghadapi dampak tidak langsung dari krisis keuangan global, penurunan bantuan keuangan internasional dan ketidakamanan politik yang sedang berlangsung perekonomian Fiji kini cenderung menyusut lebih lanjut dan kemiskinan cenderung meningkat di Fiji.

Pada tanggal 14 April 2009 *Australia-Fiji Business Council* mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pencabutan Konstitusi Fiji. *Australia-Fiji Business Council* juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Commodore Bainimarama dapat menimbulkan kerusakan lebih lanjut untuk ‘perekonomian yang rapuh’ di Fiji dan masyarakat Fiji. Pernyataan itu juga memperingatkan terhadap sanksi ekonomi terhadap Fiji karena hal ini lebih lanjut dapat merusak kepentingan komersial Australia dan lainnya di Fiji.

Australia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengupayakan pemulihan demokrasi di Fiji. Langkah ini diambil oleh pemerintah negara Australia sebagai respon atas tindakan kudeta militer yang dilakukan di bawah komando Frank Bainimarama yang menggulingkan pemerintahan sipil di tahun 2006. Pemerintah Australia melakukan hal tersebut untuk menghindari terjadinya efek domino di negara-negara Pasifik Selatan lainnya.

Australia tidak menginginkan adanya kudeta militer serupa yang menyalahi demokrasi di dalam kawasan tersebut karena hal ini dapat mengancam keamanan negara Australia. Pada awal terjadinya kudeta, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase meminta intervensi pasukan Australia. Permintaan intervensi pasukan ini ditujukan untuk membantu pemerintah Fiji dalam menghadapi kudeta militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama. Namun permintaan tersebut ditolak oleh PM John Howard karena tidak ingin ikut campur dalam krisis politik di Fiji. Meskipun demikian, John Howard tetap bersikap mengecam tindakan kudeta militer di Fiji yang melanggar aturan demokrasi konstitusional.

Ada beberapa tindakan intervensi baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk menanggapi kudeta yang terjadi di Fiji dan mengembalikan nilai demokrasi yang telah dibangun Australia di Fiji namun tercemar oleh kudeta yang terjadi.

Adapun intervensi tersebut antara lain:

- a. Kebijakan Australia bekerja sama dengan negara lain di Pasifik Selatan, regional maupun internasional untuk mengisolasi Fiji. Hal ini sesuai dengan pendapat Perdana Menteri Julia Gillard: *“It’s important to us, to the US, to the world generally, that we keep working together to maximise pressure on Fiji to give the Fijian people the appropriate opportunity to go out, exercise a vote and pick their government”*. Sebagian besar mitra tradisional Australia mendukung kebijakan pemerintah Australia menuju demokrasi Fiji setelah kudeta.
- b. Australia memberlakukan sanksi ekonomi, perdagangan, wisata, olahraga. Embargo senjata dan suspensi kerjasama pertahanan. menagguhkan Kontak diplomatik dengan pemerintah Fiji. pembekuan aset warga Fiji di Australia atau pebisnis Australia yang akan dikenakan sanksi berurusan dengan Fiji dan dilarangnya turis australia untuk bepergian ke Fiji yang dilakukan oleh pemerintah Howard pada saat kudeta terjadi.
- c. Australia meperketat pemberian visa kepada siapa saja yang memiliki keterlibatan dengan penguasa Fiji. sanksi di terapkan hanya untuk yang berhunungan denga Bainimarama, anggota kabinetnya, Dewan Militer dan petugas militer lainnya.
- d. Fiji diskors dari Dewan Persemakmuran. Pada tanggal 4 Maret 2009, *Commonwealth* memberi Fiji batas waktu enam bulan untuk kembali ke demokrasi, pemerintahan yang dipimpin bainarama dianggap Persemakmuran bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Persemakmuran. *Commonwealth Minister of Action Group* (CMAG) menyatakan bahwa seharusnya kemajuan yang memuaskan dibuat oleh Fiji menuju pemulihan demokrasi. Fiji sepenuhnya ditangguhkan keanggotaannya dari Persemakmuran pada pertemuan berikutnya tanggal 26 September 2009, Pada bulan April 2009, *Commonwealth Minister of Action Group* (CMAG) menyesalkan pembatalan Konstitusi Fiji dan menyerukan kembalinya demokrasi. Pada tanggal 31 Juli 2009, CMAG mengadakan pertemuan luar biasa di London, di mana Fiji diancam dengan di keluarkan dari forum pada 1 September jika tidak mengumumkan bahwa akan mengadakan pemilihan umum paling

lambat Oktober 2010.

Dengan adanya sanksi tersebut, maka Fiji tidak berhak mendapatkan bantuan Persemakmuran dalam segala bidang. CMAG yang merupakan kelompok negara persemakmuran beserta PIF, forum negara-negara Pasifik Selatan memutuskan untuk menutup semua bantuan yang mungkin diterima oleh Fiji, kecuali bantuan yang ditujukan untuk memfasilitasi pemulihan demokrasi di Fiji. Fiji tidak akan diikutsertakan dalam semua pertemuan antar pemerintah Persemakmuran. Semua perwakilan Fiji di sekretariat Persemakmuran akan dihentikan.

- a. Saat Australia tuan rumah pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Agustus 2009 yang mengumumkan resmi dimulainya negosiasi dan tidak mengundang Fiji dalam pertemuan tersebut. banyak Negara kepulauan Pasifik prihatin mengenai tidak di ikut sertakanya Fiji dari PACER Plus.
- b. Australia berusaha meyakinkan PBB untuk mencegah Fiji berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian.

Pemerintah Australia bisa membantah bahwa memiliki fine-tuned sanksi rezim untuk menghindari tidak sengaja mengejar pendukung demokrasi dan good governance di Fiji pada sebuah kebijakan yang dirancang untuk menekan pelaku kudeta 2006. Keputusan ini akan menghapus salah satu iritasi yang Bainimarama menggunakan mengkritik Australia di mata warga Fiji dan membersihkan jalan untuk pendekatan yang lebih efektif.

Pemerintah Australia, bersama dengan donor lainnya, siap untuk membantu keuangan untuk Komisi Pemilihan Fiji untuk melakukan pemilu. Tawaran Forum Kepulauan Pacific untuk memberikan bantuan untuk kembali awal ke demokrasi juga sama agenda Fiji.

Pemerintah Australia harus mengakui bahwa pemerintah Fiji memiliki konstitusi baru pada tahun 2013 dan Pemilu tahun 2014 dan secara terbuka mengumumkannya siap untuk menawarkan paket bantuan baru dengan menyusun satu konstitusi baru dan bantuan dengan mengeksplorasi pilihan untuk mengadopsi sistem pemilu baru. Sementara Fiji ingin menerapkan reformasi pemilu, tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya dan kemungkinan membutuhkan bantuan untuk setiap reformasi yang signifikan.

Australia harus memimpin inisiatif pendanaan dan memastikan bahwa semua mitranya bersedia berperan dalam melobi pemerintahan Fiji untuk menerima tawaran baik secara pribadi dan publik. Inisiatif pertama

Misalnya mengambil tim ahli reformasi konstitusi dan pemilu dari kalangan koalisi dan bekerja dengan Pemerintah Fiji untuk menentukan jenis dan tingkat bantuan teknis yang di butuhkan di pemilu Fiji.

Australia juga membuat catatan yang jelas bahwa jika Fiji siap untuk menerima usulan Australia akan memberikan berbagai inisiatif lain untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Fiji dan memungkinkan Fiji untuk mulai berintegrasi dengan wilayah Kepulauan Pasifik kembali.

Strategi ini menunjukkan bahwa Australia ingin berinvestasi di Fiji dengan masa depan yang demokratis dan bahwa tujuannya adalah untuk memajukan dan melindungi hubungan jangka panjang antara masyarakat Australia dan orang-orang Fiji.

Pada awalnya, Frank Bainimarama telah berjanji untuk menyelenggarakan pemilu demokratis pada bulan Maret 2009. Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya selalu mendorong Fiji untuk segera melaksanakan pemilu yang lebih demokratis. Namun kemudian Bainimarama menyatakan mereka akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2014.

Pada bulan November 2009, Frank Bainimarama justru melakukan tindakan *Persona non grata* terhadap *High Commissioner* Australia di Fiji, James Bartley. Frank Bainimarama beralasan bahwa pejabat Australia tersebut telah mencampuri urusan dalam negeri Fiji. PM Australia, Kevin Rudd merasa sangat kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh rezim pemerintahan militer tersebut.<sup>12</sup>

Pemerintah Fiji telah menunjukkan dirinya untuk resisten terhadap tekanan. Bainimarama membuat jelas bahwa keterlibatan apapun akan menjadi istilah saja Tanpa ragu, tindakan Fiji telah merusak hubungan dengan pasangan yang paling penting Australia. Bainimarama telah meremehkan Ketergantungan ekonomi Fiji di Australia. Dia mengusir diplomat paling berpengalaman Australia diplomatik provokatif membuat lebih sulit bagiaustralia untuk berdialog. Fiji mengeluarkan Peraturan Darurat publik untuk meningkatkan sensor media langkah ini sulit bagi pemerintah Australia untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif.

Pemerintah Fiji telah memulaimencari koalisi baru. Fiji berusaha menjadi anggota Gerakan Non-Blok dan mengumumkan akan mendirikan tiga kedutaan baru di Indonesia, Brazil dan Afrika

---

<sup>12</sup> Markovic. Nina, *A timeline of the 2009 political crisis in Fiji and key regional reaction*, Foreign Affairs, Defence and Security Section, Agustus 2009.

Selatan pada tahun 2011.<sup>13</sup> Bainimarama telah membuat klaim untuk kepemimpinan daerah dengan menyelenggarakan sebuah ‘pertemuan negara-negara Pasifik di Fiji, dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan dari sepuluh Negara kepulauan Pasifik, sebelum Pertemuan Forum Kepulauan Pasifik pada bulan Juli 2010 dan menjadi tuan rumah dan memimpin *Spearhead Melanesia* pada Maret 2011.<sup>14</sup>

## **Simpulan**

Australia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengupayakan pemulihan demokrasi di Fiji. Langkah ini diambil oleh pemerintah negara Australia sebagai respon atas tindakan kudeta militer yang dilakukan di bawah komando Frank Bainimarama yang menggulingkan pemerintahan sipil di tahun 2006. Pemerintah Australia melakukan hal tersebut untuk menghindari terjadinya efek domino di negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Australia tidak menginginkan adanya kudeta militer serupa yang menyalahi demokrasi di dalam kawasan tersebut karena hal ini dapat mengancam keamanan negara Australia.

Berdasarkan analisa teori intervensi, Salah satu cara yang dapat dilakukan agar suatu Negara memenuhi kehendak Negara lain adalah dengan mengadakan campur tangan dalam urusan internal suatu negara, misalnya keberadaan suatu Negara terancam dengan adanya masalah yang timbul di dalam Negara tersebut, sedang penyelesaian masalahnya dianggap tidak dapat diterima dan berbeda penanganannya oleh pihak lain sehingga terdapat perbedaan sikap dan pandangan. Dengan campur tangan atau intervensi tersebut agar diakui kehendaknya dan sekaligus menanamkan pengaruhnya dari Negara yang melakukan campur tangan tersebut.

Australia memiliki beberapa kepentingan politik dan ekonomi dinegara Fiji, diantaranya: Australia mencoba mengembangkan konsep demokrasi modern di Fiji, Australia juga bekerjasama dengan Fiji dalam mengatasi kejahatan transnasional, ketakutan Australia dalam peningkatan hubungan Fiji dan China. Kepentingan ekonomi Australia diantaranya, Australia merupakan pemberi bantuan dan memiliki investasi besar di negara Fiji, tingginya nilai ekspor - impor Australia dengan Fiji, tingginya minat investasi langsung Australia di Fiji.

---

13 Peak Daniel, *Tourism Fiji : A Social, Political and Environmental Case Study*, Review of Tourism Research (eRTR), Vol. 5, No.3, 2007

14

Untuk mengembalikan demokrasi di Fiji dan menyikapi kudeta yang terjadi Australia melakukan Intervensi Internal dan Intervensi Eksternal. intervensi internal berupa Australia memberlakukan sanksi ekonomi, perdagangan, wisata, olahraga. Embargo senjata dan suspensi kerjasama pertahanan, Australia meperketat pemberian visa, Australia tidak mengundang Fiji saat pertemuan PACER Plus di Australia, Australia berusaha meyakinkan PBB untuk mencegah Fiji berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian.

Intervensi Eksternal berupa, Australia bekerja sama dengan negara lain di Pasifik Selatan regional maupun Internasional untuk mengisolasi Fiji, Fiji diskors dari Dewan Persemakmuran. Pada tanggal 4 Maret 2009, *Commonwealth* dan *Pasific Island Forum* (PIF).

Australia selalu berusaha dan berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dan bersifat terbuka terhadap Fiji. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan demokrasi di negara tersebut.

Australia mencoba mengubah posisi negara dari negara barat menjadi negara kawasan tanpa menghilangkan budaya dan identitas Australia. Hal ini dapat dianalisis dari bagaimana sikap pemerintah Australia di bawah kepemimpinan John Howard dan Kevin Rudd dalam konflik Fiji.

### **Daftar Pustaka**

- Nohlen, Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 1994, hal 186
- Brown Peter, *Australian Influence in the South Pacific*, Australian Defence College, 2012.
- Jones, Jenny Hayward Policy Brief, *Policy Overboard: Australia's Increasingly Costly Fiji Drift*, Lowy Institute For International Policy: May 2011.
- Markovic. Nina, *A timeline of the 2009 political crisis in Fiji and key regional reaction*, Foreign Affairs, Defence and Security Section, Agustus 2009.
- Peak Daniel, *Tourism Fiji : A Social, Political and Environmental Case Study*, Review of Tourism Research (eRTR), Vol. 5, No.3, 2007
- Intervensi Australia, Diakses dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/05/22/2002.html/> pada tanggal 4 juli 2013
- Kudeta militer Fiji” diakses dari <http://dw.de/p/CPAcpada> pada tanggal 4 juli 2013